

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Suatu sistem dibuat agar bisa membuat laporan keuangan dengan benar juga mematuhi aturan yang berlaku. Sistem akuntansi keuangan daerah adalah salah satu yang memungkinkan pembuatan laporan keuangan yang baik. Semua lembaga pemerintahan diharapkan bisa menerapkan sistem ini dengan baik. Sistem akuntansi keuangan ini sangat penting sebab bisa mengatur setiap aktivitas keuangan.

Informasi yang benar dan tepat pada waktunya yang diperoleh bersumber dari akuntansi ini berupa anggaran dan aktivitas instansi. Informasi keuangan yang berdasarkan sistem akuntansi pemerintahan daerah, serta pengukuran yang memakai informasi, berfungsi guna dasar keputusan terkait aktivitas kepatuhan ataupun kinerja atas otorisasi anggaran pemerintahan daerah guna mencapai target akuntabilitas.

Salah satu keuntungan dari diterapkannya SAKD yang didasarkan pada patokan akuntansi pemerintahan adalah tujuan penyusunan serta pengembangan sistem akuntansi keuangan pemerintahan agar bisa menaikkan akuntabilitas serta keunggulan dalam pengelolaan keuangan.

Eskalasi inisiatif yang bertujuan menuntut akuntabilitas dari lembaga publik pusat dan regional saat ini mempengaruhi metodologi yang dipakai dalam manajemen keuangan. Akuntabilitas dikonseptualisasikan sebagai kebutuhan guna memikul tanggung jawab atas pencapaian ataupun kekurangan dalam pelaksanaan tugas organisasi menuju

pemenuhan tujuan yang ditetapkan, difasilitasi melalui sistem akuntabilitas yang dilakukan secara konsisten ataupun pada interval yang ditentukan. Dalam rana sektor publik, administrasi pemerintahan ditugaskan dengan kewajiban pelaporan keuangan

Sejalan dengan ketentuan pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 terkait pengelolaan keuangan daerah, badan pemerintahan daerah diberi mandat guna membentuk kerangka akuntansi yang diatur dari ketentuan Kepala Daerah. Tujuan dari kerangka kerja ini adalah guna secara sistematis merekam, menerangi, dan melaporkan transaksi keuangan pemerintahan daerah. dari sebab itu, prinsip otonomi daerah mengharuskan penyusunan laporan keuangan sejalan dengan ketentuan yang ditetapkan dari otoritas pemerintahan daerah ataupun pusat.

Dengan penerbitan PP No. 71 Tahun 2010 terkait Standar Akuntansi pemerintahan (SAP), yang menggantikan ketentuan pemerintahan No. 24 tahun 2005, akuntansi berbasis akrual menjadi dasar akuntansi yang diterapkan. Akuntabilitas mengandung arti memberikan pertanggungjawaban dan menjelaskan tindakan dan kinerja kepada pihak yang berhak meminta pertanggungjawaban.

Transparansi, dalam kerangka ini, mencakup penyebaran data keuangan yang jujur dan jujur ke domain publik. Infrastruktur akuntansi yang kuat sangat penting guna realisasi transparansi dan akuntabilitas dalam sektor publik. Sistem Akuntansi keuangan Regional (SAKD) diantisipasi guna meningkatkan akurasi, ketepatan, dan kelengkapan catatan dan laporan yang berkaitan dengan transaksi keuangan pemerintahan daerah, sehingga memungkinkan pengguna laporan keuangan guna membuat keputusan yang lebih tepat.

Pelaksanaan SIPD di Kota Kupang, yang diakui sebagai salah satu daerah otonom di Nusa Tenggara Timur, mencontohkan upaya yang bertujuan guna menambah transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip otonomi daerah, dalam hubungannya dengan kebijakan pemerintahan mengenai sistem informasi pemerintahan daerah, berfungsi sebagai elemen dasar guna pencapaian tujuan ini.

Pemerintah Kota Kupang terus berusaha guna meningkatkan pemerintahan dan meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan. Salah satunya adalah menyesuaikan sistem dan sumber daya manusia dengan regulasi terbaru. seperti yang dilakukan dari pemerintahan kota Kupang, Badan keuangan Daerah kota Kupang menyelenggarakan pelatihan teknis guna melaksanakan Permendagri nomor 70 tahun 2019 terkait Sistem Informasi pemerintahan Daerah (SIPD). guna memulai SIPD, beberapa instansi menghadapi tantangan dan masalah seperti sistem yang tidak berfungsi, yang menyebabkan mereka terlambat menyelesaikan pekerjaan mereka, membuat mereka memilih guna memakai sistem yang lebih lama.

Karena aplikasi terbaru, SIPD (Sistem Informasi pemerintahan Daerah), masih dalam tahap uji coba, semua OPD diwajibkan guna menggunakannya pada awal tahun 2021 dari Kementerian Dalam Negeri. Beberapa OPD, terutama , menghadapi beberapa kesulitan saat menggunakannya, terutama sebab banyak menu yang harus dimasukkan ke dalam SIPD, dan pegawai sering melewatkan proses tertentu, menyebabkan laporan yang tidak lengkap. pemerintahan Daerah bisa mengembangkan berbagai jenis SIPD, termasuk Informasi Pembangunan, Informasi Keuangan, dan Informasi pemerintahan Daerah Lainnya.

Perumusan Anggaran Daerah, Pelaksanaan, dan Pengawasan Urusan Fiskal Daerah, bersama dengan Mekanisme Akuntansi dan Pelaporan keuangan Daerah, dan Langkah-langkah Akuntabilitas guna Pelaksanaan Strategi keuangan Daerah merupakan beberapa metodologi yang paling efisien dan efektif guna mengelola sumber daya fiskal daerah sambil menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar akuntabilitas dan transparansi.

Menurut temuan yang diperoleh dari pengamatan sistematis dan wawancara awal yang dilakukan dari para peneliti, telah ditentukan bahwa Sistem Akuntansi keuangan Daerah belum dioperasionalkan secara komprehensif dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah. Ketidacukupan ini sangat jelas dalam penerapannya baru-baru ini guna proses perencanaan dan penganggaran, di mana Sistem Akuntansi keuangan Regional sering gagal memenuhi hasil yang diantisipasi. Kekurangan ini bisa dikaitkan dengan beberapa hambatan, terutama kekurangan sumber daya manusia dan hambatan teknis, terutama gangguan yang sering terjadi dalam konektivitas Internet yang mengganggu pengoperasian sistem ini. Akibatnya, ini menyebabkan ketidakakuratan dalam entri data, sebab banyak orang terus mengandalkan sistem manual (seperti Excel), terutama mereka yang tidak memiliki pengetahuan ataupun keterampilan yang diperlukan guna memakai sistem secara efektif. Masalah kritis ini berfungsi sebagai dorongan utama bagi para peneliti guna melakukan penyelidikan yang lebih mendalam terkait masalah ini. **“Analisis Penerapan Sistem Akuntansi keuangan Daerah Pada Badan keuangan Dan Asett Daerah Kota Kupang”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Mengingat ikhtisar kontekstual yang disebutkan di atas, Perumusan masalah penelitian dalam penelitian ini berkaitan dengan cara penerapan Sistem Akuntansi keuangan Daerah dalam Badan pengelolaan keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Kupang.

## **1.3. Tujuan dan Manfaat Peneliitian**

### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan penjelasan isu anteseden, tujuan penelitian ini adalah guna menyelidiki pelaksanaan kerangka akuntansi keuangan daerah dalam Badan Pembiayaan Dana Aset Daerah (BKAD) Kota Kupang.

### **1.3.2. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis
  - a. Untuk meningkatkan kumpulan pengetahuan dan menyempurnakan pemahaman pemeriksaan penerapan kerangka akuntansi keuangan regional sejalan dengan standar akuntansi yang relevan; dan
  - b. Menjadi sumber literatur guna peneliti yang nantinya datang;
2. Manfaat Praktis
  - a. Untuk pemerintah:

Penelitian ini diantisipasi guna berfungsi sebagai kontribusi dasar dan musyawarah mengenai penerapan praktik akuntansi yang

relevan. Selain itu, diproyeksikan guna menghasilkan utilitas yang signifikan guna periode mendatang.

b. Untuk penulis:

Diantisipasi bahwa upaya penelitian ini nantinya memperluas perspektif penulis dan menetapkan titik acuan antara kerangka teoritis yang dieksplorasi dalam kuliah akademik dan penerapan praktis Sistem Akuntansi keuangan di Wilayah Kota Kupang. Selanjutnya, penelitian ini diharapkan bisa memberi penulis wawasan pengalaman yang berharga.

c. Untuk pembaca:

Diharapkan penelitian ini bisa dijadikan rekomendasi guna menambah pengetahuan pembaca. Diharapkan penelitian bisa menjadi rekomendasi yang bermanfaat guna menyelesaikan tugas akhir yang berkaitan dengan sistem akuntansi keuangan daerah.